

KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA MISKIN PERDESAAN

Rita Hanafie

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang

ABSTRACT

Food diversification as effort to increase food security, one of which is conducted by promoting the society's awareness in consuming varieties of food using a balance of nutrition principle. Though it has been implemented for nearly 40 years, food consumption diversification as the main component of food security, especially for the poor families at villages, has not run as it has been expected. This study reveals that the food consumption of the poor households has not fulfilled the criteria of four healthy, the consumption of energy is 60,40 % AKE and the protein is 34,31% AKP, had not reflected the food security condition. The food consumption diversification quality score is only 23,69 %. Only one food group, namely beans was consumed with the proportion nearly PPH norm, two food groups, namely tubers and fruits/oily seed were consumed beyond the normative proportion and the five groups of food, namely rice, animal food, fat oil, sugar and vegetables and fruits were consumed under the normative proportion.

Key words : *Food Consumption Diversification, PPH Norm, Food Security*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Peningkatan ketahanan pangan yang merupakan salah satu program utama pembangunan pertanian dewasa ini (Rasahan dalam Wibowo, 2000), mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena akses pangan dan gizi seimbang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Keberhasilan dalam proses pembentukan sumberdaya manusia terletak pada keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi.

Upaya mencapai manusia Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Sehat tahun 2010, sangat terkait dengan faktor pangan dan gizi. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang. Kebijakan pembangunan pangan nasional diarahkan pada pemantapan ketahanan pangan (Hardinsyah, 2000) yang salah satunya adalah penurunan tingkat konsumsi beras dan peningkatan skor mutu konsumsi pangan.

Ketahanan pangan telah menggeser orientasi komoditas menjadi orientasi nutrisi (kecukupan gizi) yang sumbernya bisa dari berbagai komoditas. Hal ini membuka peluang

adanya intervensi kebijakan untuk merubah pola beras menjadi pola yang lebih beragam, yang merupakan salah satu agenda utama dalam strategi ketahanan pangan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Amang (1995), untuk mencapai ketahanan pangan, maka aspek diversifikasi produksi dan konsumsi merupakan salah satu cara yang dianggap paling aman, baik oleh ahli pertanian, nutrisi, sosiolog maupun ekonom.

Meskipun sudah berjalan kurang lebih 40 tahun, implementasi Inpres No. 20/1979 tentang Penganekaragaman Menu Makanan Rakyat dan Perbaikan Gizi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini terlihat dengan masih tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat yaitu 120-130 kg/kapita/tahun (Saragih, 2002). Pada rumahtangga miskin yang bagian terbesar pendapatannya (60 %) masih dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sumber karbohidrat (Gunawan, 1991), upaya pemenuhan kebutuhan gizi tubuh dari sumber-sumber protein, mineral dan vitamin merupakan permasalahan yang memprihatinkan, dan kondisi ini akan berakibat lebih lanjut pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, yang berawal dari kondisi ibu hamil dan balita sebagai keluaran dari ketahanan pangan (Wibowo, 2000). Partisipasi dan produktifitas masyarakat dengan derajat ketahanan pangan rendah sangat tidak menguntungkan dalam rangka pembangunan di segala bidang.

KERANGKA PIKIRAN

Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan merupakan kemampuan rumahtangga menyediakan pangan bagi seluruh anggota rumahtangganya dalam jumlah, mutu, aman, merata dan berkesinambungan. Kemampuan menyediakan pangan ini tercermin dalam pola konsumsi pangan yang merupakan susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi setiap hari dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia, susunan makanan yang ideal ini secara umum dikenal dengan Empat Sehat Lima Sempurna.

Diversifikasi konsumsi pangan merupakan implementasi dari pola konsumsi pangan dalam menu makanan sehari-hari. Diversifikasi konsumsi pangan adalah beranekaragamnya bahan pangan yang dikonsumsi, mencakup pangan sumber energi dan zat gizi lainnya, dalam bentuk mentah maupun olahan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan pangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pentingnya diversifikasi konsumsi pangan ini terlihat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1974 yang kemudian disempurnakan dengan Inpres No 20/1979. Tujuan Inpres ini bukan saja mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis komoditas pangan tertentu, yaitu beras, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan masyarakat. Ditinjau dari tiga dimensi ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan, maka diversifikasi konsumsi pangan melekat pada dimensi stabilitas yaitu kemampuan meminimalkan konsumsi pangan terutama pada masa-masa sulit.

Dari diversifikasi konsumsi pangan yang dilakukan, penilaian konsumsi pangan dilakukan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan rumahtangga, baik dari sisi konsumsi energi maupun protein. Apabila tingkat konsumsi energi dan protein lebih besar atau sama dengan 75 % Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan yaitu energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari dan protein sebesar 50 gram/kap/hari, maka dikatakan rumahtangga berada dalam kondisi yang tahan pangan. Sementara itu dari diversifikasi

konsumsi pangan juga dapat diketahui banyaknya jenis pangan yang dikonsumsi dan mutu konsumsi pangan, yang dihitung berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan (PPH), yang dinyatakan dengan skor. Rasio antara skor PPH aktual dengan skor PPH normatif menunjukkan derajat ketahanan pangan rumah tangga.

Karena pangan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang berarti bahwa pemerintahpun bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, maka tercapainya ketahanan pangan merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Upaya mencapai ketahanan pangan melalui swasembada pangan dengan peningkatan produksi dalam negeri maupun impor pangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Alternatif yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan.

Diversifikasi konsumsi pangan tidak bermasalah bagi rumah tangga yang memiliki daya beli. Permasalahan diversifikasi konsumsi pangan justru ada pada kelompok rumah tangga miskin, dengan daya belinya yang terbatas.

BAHAN DAN METODE

Pola Konsumsi Pangan

Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup macam dan jumlah bahan pangan rerata/orang/hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu (BBKP, 2000). Susunan makanan ini dikelompokkan berdasarkan kriteria Empat Sehat (Sediaoetama, 2001 dan Almansier, 2002) yaitu makanan pokok, lauk-pauk, sayur dan buah. Pola konsumsi pangan dikatakan memenuhi kriteria Empat Sehat apabila keempat kelompok pangan tersebut dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup.

Konsumsi Energi dan Protein

Ditentukan dengan analisis gizi atau penilaian konsumsi pangan. Penghitungan kandungan energi dan protein dilakukan dengan bantuan DKGM (Daftar Kandungan Gizi Bahan Makanan), DKGJ (Daftar Kandungan Gizi Makanan Jajanan), DPM (Daftar Konversi Penyerapan Minyak), dan DMM (Daftar Konversi Berat Mentah Masak) yang memuat angka-angka kandungan zat gizi berbagai bahan pangan baik mentah maupun masak (olahan) yang banyak dijumpai di Indonesia, dengan rumus sebagaimana dikemukakan Hardinsyah dan Martianto (1992) sebagai berikut :

Jumlah zat gizi bahan pangan :

$$G_{ij} = (B_j/100) \times KG_{ij} \times (BDD_j/100)$$

Jumlah zat gizi makanan jajanan :

$$G_{ij} = (B_j/B_{jd}) \times KG_{ij}$$

Menaksir berat bahan pangan dari makanan olahan :

$$F_j = (BM_j)/(BO_j)$$

$$BM_j = (F_j) \times (BO_j)$$

$$BO_j = (BM_j) / (F_j)$$

Menaksir zat gizi bahan pangan yang diolah dengan minyak :

$$M_j = (BK_j)/(BM_j) \times 100$$

$$BK_j = (M_j) \times (BM_j) / 100$$

Keterangan :

- Gij = jumlah zat gizi i yang dikonsumsi dari bahan pangan j
- Bj = berat bahan pangan j dalam gram
- KGij = kandungan zat gizi i dalam 100 gram bahan pangan j
- BDDj = persen bahan pangan j yang dapat dimakan (% BDD)
- i = jenis zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan yaitu energi dan protein
- j = bahan pangan. Terdapat 532 bahan pangan dalam Daftar Kandungan Gizi Bahan Makanan.
- Bjd = berat makanan jajanan j yang tercantum dalam DKGJ (gram)
- Fj = faktor koreksi berat mentah masak bahan makanan j
- BMj = berat bahan makanan j dalam bentuk mentah
- BOj = berat bahan makanan j dalam bentuk olahan
- Mj = faktor koreksi penyerapan minyak pada bahan pangan j (gram)
- BKj = berat minyak yang diserap bahan pangan j (gram)

Tingkat Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat Konsumsi Energi adalah konsumsi energi yang dinyatakan dalam persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE), dihitung dengan rumus :

- Tingkat konsumsi energi = $(\text{konsumsi energi} / 2.200) \times 100 \%$

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah besarnya energi yang dibutuhkan tubuh untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yaitu sebesar 2.200 kkal/kap/hari (Suhardjo, 1998; Muhilal dkk., 1998 dan Hardinsyah dkk., 2001).

Tingkat Konsumsi Protein adalah konsumsi protein yang dinyatakan dalam persen terhadap Angka Kecukupan Protein (AKP), dihitung dengan rumus :

- Tingkat konsumsi protein = $(\text{konsumsi protein} / 50) \times 100 \%$

Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah besarnya protein yang dibutuhkan tubuh untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yaitu sebesar 50 gram/kap/hari (Suhardjo, 1998; Muhilal dkk., 1998 dan Hardinsyah dkk., 2001).

Ketahanan Pangan Rumah tangga

Rumah tangga dikatakan berada dalam kondisi ketahanan pangan apabila mampu mengkonsumsi energi minimal sebesar 75 % AKG yang direkomendasikan (Sachett *et. al.*, 1991; Soekirman, 1996 dan Soehardjo, 1998)

- Ketahanan pangan rumah tangga : $TKE \geq 75 \% AKE, TKP \geq 75 \% AKP$

Diversifikasi Konsumsi Pangan

Diversifikasi konsumsi pangan (BBKP, 2000) adalah beranekaragamnya bahan pangan yang dikonsumsi, mencakup bahan pangan sumber energi dan zat gizi lainnya. Diukur dengan mutu konsumsi pangan yaitu kualitas pangan yang didasarkan pada proporsi energi setiap kelompok pangan terhadap AKE yang dianjurkan dan bobot masing-masing kelompok pangan, yang dihitung menurut Norma Pola Pangan Harapan dan dinyatakan dengan skor, oleh karena itu disebut juga dengan Skor Mutu Konsumsi

Pangan (SMKP) atau Skor PPH. Dalam Norma PPH (FAO-RAPA, 1989; Suhardjo, 1998; BPKP, 2000 dan Hardinsyah dkk., 2001).

Menghitung kandungan energi masing-masing bahan pangan yang dikonsumsi:

$$E_j = B_j \times KE_j / 100 \times (BDD_j / 100)$$

Menghitung total energi masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi

$$E_p = \sum_{j=1}^m E_{jp}$$

Menghitung total energi yang dikonsumsi :

$$TE = \sum_{p=1}^9 E_p$$

Menghitung persentase energi masing-masing kelompok pangan terhadap AKE:

$$P_p = (E_p / AKE) \times 100 \%$$

Menghitung skor mutu konsumsi masing-masing kelompok pangan :

$$SMKP_p = P_p \times B_p$$

Menghitung skor mutu konsumsi pangan

$$SMKP = \sum_{p=1}^9 SMKP_p$$

Keterangan :

- E_j = energi yang dikonsumsi dari bahan pangan j
- B_j = berat bahan pangan j (gram)
- KE_j = kandungan energi per 100 gram bahan pangan j
- BDD_j = persen bahan pangan j yang dapat dimakan
- j = bahan pangan.
- E_p = total energi dalam kelompok pangan p
- E_{jp} = energi dari bahan pangan j yang termasuk dalam kelompok pangan p
- p = kelompok pangan, 1
- TE = total energi dari seluruh kelompok pangan
- P_p = persentase energi masing-masing kelompok pangan terhadap AKE
- AKE = Angka Kecukupan Energi = 2.200 kkal/kap/hari
- $SMKP_p$ = skor mutu konsumsi pangan kelompok pangan p
- B_p = bobot kelompok pangan p
- $SMKP$ = total skor mutu konsumsi pangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Konsumsi Pangan Rumah tangga Miskin Perdesaan

Pada umumnya menu makanan di Indonesia terdiri atas pangan pokok pemberi rasa kenyang, lauk-pauk pemberi rasa nikmat, sayur pemberi rasa segar dan buah sebagai 'pencuci mulut' (Sediaoetama, 2000 dan Almatsier, 2002), yang diperkenalkan pertama

kali oleh Bapak Ilmu Gizi (Prof. Dr. dr. Poorwo Soedarmo) pada tahun 1950 dan dikenal dengan Pola Empat Sehat. Susunan makanan ini - dengan kombinasi dan jumlah yang tepat - dapat memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola konsumsi pangan rumahtangga miskin perdesaan meliputi pangan pokok (beras saja atau campuran beras dan gaplek), sayur dan lauk nabati dengan frekuensi makan tiga kali sehari, jadi “belum” memenuhi kriteria empat sehat, karena buah dan lauk hewani belum menjadi bagian dalam pola konsumsi pangannya. Rerata tingkat konsumsi masing-masing kelompok pangan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Konsumsi Masing-masing Kelompok Pangan menurut Pola Empat Sehat oleh Rumahtangga Miskin Perdesaan, Tahun 2003

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi (gram/kap/hari)	
		Aktual	Normatif
1	Beras	202,50	300
2	Sayur	116,70	150
3	Lauk :		
	Hewani	8,76	100
	Nabati	41	100
4	Buah	1,98	200

Sumber : Data primer diolah, 2003

Ketahanan Pangan Rumahtangga Miskin Perdesaan

Ketahanan pangan rumahtangga ditentukan oleh tingkat konsumsi energi dan proteinnya (Sachett *et. al.*, 1991). Konsumsi energi dan protein serta tingkat konsumsi energi dan protein rumahtangga miskin perdesaan tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Konsumsi Energi dan Protein serta Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Rumahtangga Miskin Perdesaan, Tahun 2003

Energi		Protein	
Konsumsi (kcal/kap/hari)	Tingkat Konsumsi (% AKE)	Konsumsi (gram/kap/hari)	Tingkat Konsumsi (% AKP)
Rerata	St. Dev	Rerata	St. Dev
1.328,94	297,99	60,40	13,54
		17,16	4,47
		34,31	8,94

Sumber : Data primer

Rerata konsumsi energi sebesar 1.328,94 kkal/kap/hari. Konsumsi pangan pokok merupakan campuran antara beras (35 kg/kap/tahun) dan gaplek (80,65 kg/kap/tahun) dengan komposisi lebih berat kepada gaplek dimana kandungan energi gaplek lebih besar daripada beras. Relatif tingginya konsumsi energi ini diperkuat dengan konsumsi bahan pangan dari kelompok sayur yaitu daun singkong dan nangka muda yang juga

memiliki kandungan energi cukup besar.

Tingkat konsumsi energi (TKE) sebesar 60,40 % AKE. Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu (Dinkes Jatim, 2001: 102,20 % AKE; Latief dkk., 2000 : 92,98 % AKE; PSKP dan BBKP, 2001 : 84 % AKE dan Adi dkk., 1999 : 60,10 % AKE). Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pada unit analisis dan AKE yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan unit analisis rumahtangga pada umumnya sementara penelitian ini mengambil rumahtangga miskin perdesaan sebagai unit analisisnya. AKE yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 2.200 kkal/kap/hari (Hardinsyah dkk., 2001 dan Ariani 2002), sementara penelitian terdahulu menggunakan AKE sebesar 2.150 kkal/kap/hari.

Dengan menggunakan *cut off point* klasifikasi kondisi ketahanan pangan dari Sachett *et. al.*, (1991), Soekirman (1996) dan Suhardjo (1998), distribusi tingkat konsumsi energi rumahtangga miskin hasil penelitian tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Konsumsi Energi berdasarkan Kondisi Ketahanan Pangan Rumahtangga Miskin Perdesaan, Tahun 2003

<i>Cut off Point</i>	Rumahtangga	
	(Rt)	(%)
< 75 % AKE (tidak tahan pangan)	54	60,00
75-100 % AKE (cukup tahan pangan)	36	40,00
Jumlah	90	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2003

Mayoritas tingkat konsumsi energi rumahtangga miskin di daerah penelitian termasuk dalam kondisi ketidaktahanan pangan. Untuk mengatasi kekurangan gizi dan mencapai kondisi ketahanan pangan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kuantitas konsumsi pangannya, yaitu untuk mencapai konsumsi energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari atau TKE 100 % AKE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 40 % rumahtangga miskin perdesaan yang berada dalam kondisi cukup tahan pangan.

Kesimpulan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua rumahtangga miskin perdesaan berada dalam kondisi ketidaktahanan pangan. Fenomena menarik yang dapat pula diambil adalah bahwa pola konsumsi pangan pokok rumahtangga miskin ini adalah campuran antara beras (15,78 % AKE atau 35 kg/kap/tahun) dan gaplek (36,50 % AKE atau 80,65 kg/kap/tahun atau setara dengan 80 kg beras/kap/tahun). Jadi konsumsi pangan pokoknya sama dengan 115 kg setara beras/kap/tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi energi dari pangan beras sebagaimana norma PPH yaitu sebesar 111,50 kg/kap/tahun dan relatif masih dibawah konsumsi beras nasional (120-130 kg/kap/tahun).

Sebagaimana tersaji pada Tabel 2, rerata konsumsi protein rumahtangga miskin sebesar 17,16 gram/kap/hari dengan tingkat konsumsi 34,31 % AKP.. Angka ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Dinkes Jatim 2001 (118,90 % AKP); Latief dkk., 2000 (105,60 % AKP) dan PSKPG dan BBKP, 2001 (97 % AKP). Perbedaan ini disebabkan

karena (1) perbedaan pada unit analisis yang digunakan dan (2) perbedaan Angka Kecukupan Protein yang dipergunakan untuk mengukur tingkat konsumsi protein. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan Angka Kecukupan Protein sebesar 46,2 gram/kap/hari sementara itu berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VII Tahun 2000 (Hardinsyah dkk., 2001), penelitian ini menggunakan Angka Kecukupan Protein sebesar 50 gram/kap/hari.

Rendahnya konsumsi protein ini disebabkan karena disamping kandungan protein tepung gapek yang relatif rendah yaitu 1,1 gram per 100 gramnya dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi (80,65 kg/kap/tahun), juga karena kurangnya konsumsi bahan pangan sumber protein, yaitu lauk-pauk baik itu lauk nabati maupun lauk hewani (Tabel 1). Dari 200 gram protein yang dibutuhkan perhari hanya kurang lebih seperempatnya yang dikonsumsi (49,76 gram/kap/hari)

Dengan *cut off point* kondisi ketahanan pangan menurut Sachett *et. al.*, (1991), Soekirman (1996) dan Suhardjo (1998), dapat disimpulkan bahwa rumahtangga miskin di daerah penelitian tergolong belum berada dalam kondisi ketahanan pangan. Protein berguna bagi tubuh sebagai (1) zat pembangun dan pemelihara tubuh dan (2) sumber energi apabila tubuh dalam keadaan kurang energi dari karbohidrat dan lemak. Karena adanya fungsi kedua tersebut, maka penentuan kecukupan protein dilakukan setelah pangan yang dikonsumsi mampu memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari (Hardinsyah dan Martianto, 1992). Kalau ditinjau dari belum terpenuhinya konsumsi energi (TKE baru 60,40 % AKE), maka TKP yang juga relatif rendah ini tidak akan banyak manfaatnya dilihat dari fungsi protein sebagai zat pembangun. Apabila kondisi seperti ini berlangsung pada jangka panjang maka akibatnya kualitas intelektual sumberdaya manusia dari rumahtangga miskin ini menjadi sangat tidak mendukung pelaksanaan pembangunan.

Derajat Ketahanan Pangan Rumahtangga Miskin Perdesaan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rerata banyaknya jenis bahan pangan yang dikonsumsi rumahtangga miskin perdesaan adalah delapan BJK perhari, dengan komposisi empat bahan pangan sumber tenaga, satu bahan pangan sumber pembangun dan tiga bahan pangan sumber pengatur. Berdasarkan *cut off point* Roedjito (1989), konsumsi pangan dengan delapan BJK tergolong cukup. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam rangka mencapai ketahanan pangan, maka alternatif yang paling mungkin dilakukan adalah Diversifikasi konsumsi pangan. Diversifikasi konsumsi pangan rumahtangga miskin diukur dengan mutu konsumsi pangan mengacu pada Norma Pola Pangan Harapan dan dinyatakan dengan skor. Oleh karena itu skor mutu konsumsi pangan sering disebut pula dengan skor PPH.

Pola konsumsi pangan rumahtangga miskin perdesaan berdasarkan Norma PPH tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Pola Konsumsi Pangan Rumah tangga Miskin Perdesaan Berdasarkan Norma PPH

No	Kelompok Pangan	Konsumsi (kkal/kap/hari)	Proporsi Konsumsi thd AKE	Skor Mutu Konsumsi
1	Padi-padian	300,08	13,64	6,82
2	Umbi-umbian	712,14	32,37	2,50
3	Pangan Hewani	6,38	0,29	0,58
4	Minyak Lemak	95,28	4,33	2,17
5	Buah-Biji	108,52	4,93	1,00
6	Berminyak	81,40	3,70	7,41
7	Kacang-kacangan	12,20	0,55	0,27
8	Gula	12,94	0,59	2,94
9	Sayur dan Buah Pangan Lainnya	0	0	0
Jumlah		1.328,94	60,40	23,69

Sumber : Data Primer Diolah, 2003

Rerata mutu konsumsi pangan di daerah penelitian adalah sebesar 23,69. Sebagaimana disebutkan oleh Suhardjo (1998), bahwa rasio antara skor mutu konsumsi pangan aktual terhadap skor mutu konsumsi pangan normatif dikatakan sebagai derajat ketahanan pangan, maka derajat ketahanan pangan rumah tangga miskin perdesaan adalah sebesar 23,69 %. Dibandingkan dengan target pemerintah tentang mutu konsumsi pangan sebesar 69,7 pada tahun 2003, maka skor mutu konsumsi pangan di daerah penelitian masih tergolong rendah, hanya mampu mencapai 33,99 %.

Dari sembilan kelompok pangan yang ada, kelompok pangan kacang-kacangan sudah dikonsumsi dengan proporsi yang cukup ideal. Kelompok umbi-umbian dan buah-biji berminyak yang dikonsumsi melebihi proporsi normatifnya (Normatif: umbi-umbian 5 % AKE dan Buah-biji berminyak 3 % AKE), di satu sisi memang menghasilkan energi yang cukup besar, akan tetapi berkaitan dengan kualitas pangan, kedua kelompok pangan ini memiliki batas maksimal konsumsi. Lima kelompok pangan yang lain masih dikonsumsi dibawah proporsi normatifnya. Ketidakseimbangan proporsi inilah yang menyebabkan mutu konsumsi pangan rumah tangga miskin perdesaan menjadi rendah. Pola konsumsi seperti ini dikonsumsi karena bagi rumah tangga miskin perdesaan tujuan konsumsi pangan masih kepada "asal perut kenyang". Kalau dihubungkan dengan mata pencaharian utama kebanyakan rumah tangga yaitu sektor pertanian tradisional dan pekerjaan-pekerjaan yang banyak memerlukan olah tubuh, tentunya pola konsumsi seperti ini cukup mendukung, akan tetapi secara perlahan-lahan perlu adanya penyuluhan akan makna konsumsi pangan, khususnya diversifikasi konsumsi pangan berkaitan dengan upaya membentuk sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan produktif yang mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Erwidodo dkk., (1999) yang menyebutkan bahwa mutu konsumsi pangan wilayah perdesaan baru mencapai 74,62 %, sementara itu Hardinsyah dkk., (2001) menyebutkan bahwa secara nasional skor mutu konsumsi pangan masih mencapai 62,6. Ini menunjukkan bahwa kuantitas dan

kualitas konsumsi pangan rumahtangga miskin perdesaan masih perlu ditingkatkan. Jumlah bahan pangan dan kelompok pangan pada susunan menu makanan (kuantitas pangan) sebaiknya ditambah dan proporsi masing-masing kelompok pangan (kualitas pangan) sebaiknya lebih diperhatikan agar masing-masing zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini akan lebih berhasil guna apabila didukung oleh pengetahuan gizi yang baik sehingga mampu memilih bahan-bahan pangan yang bergizi tinggi dan memang dibutuhkan oleh tubuh.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi pangan rumahtangga miskin perdesaan belum mencerminkan kondisi ketahanan pangan. Ini ditunjukkan dengan pola konsumsi pangan yang belum memenuhi kriteria empat sehat, konsumsi energi (60,40 % AKE) dan protein (34,31 % AKP) masih relatif rendah. Pola konsumsi seperti itu hanya menghasilkan derajat ketahanan pangan sebesar 23,69 %.

Implikasi Kebijakan

Secara bertahap namun pasti, mengubah pola konsumsi pangan rumahtangga miskin perdesaan melalui upaya sosialisasi dan penyuluhan tentang PUGS dan diversifikasi konsumsi pangan bagi rumahtangga miskin perdesaan, harus dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) oleh siapa saja, dari siapa saja dan untuk siapa saja. Mengonsumsi pangan lokal dan tradisional justru merupakan salah satu bagian dari ketahanan pangan yang mampu dilakukan oleh masyarakat miskin, dan upaya ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Karena penyusunan pola konsumsi pangan dan PUGS ini banyak melibatkan kaum perempuan, maka mengefektifkan kembali dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perempuan (seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dasa Wisma) dapat dilakukan.

Pendidikan tentang gizi seyogyanya dilakukan sejak dini, baik secara formal maupun informal. Pentingnya pemahaman tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena pengetahuan, pengertian, pemahaman dan implementasi PUGS dalam jangka panjang akan berdampak positif bagi upaya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan bergesernya pola konsumsi pangan masyarakat dari konsumsi akan *Red Meat* ke *White Meat* karena meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan gizi, maka kampanye Gerakan Makan Ikan atau Aku Cinta Ikan perlu dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Berkaitan dengan Norma PPH, seyogyanya ditentukan proporsi energi tersendiri untuk kelompok masyarakat atau wilayah yang pola konsumsi pangan pokoknya bukan beras. Rekomendasi yang ada selama ini, proporsi untuk kelompok umbi-umbian masih terlalu kecil untuk wilayah atau kelompok masyarakat yang pola konsumsi pangan pokoknya bukan beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A.C., Kusharto, C.M., Hardinsyah dan Susanto, D., 1999. Konsumsi dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Menurut Tipe Agroekologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur *dalam* Media Gizi dan Keluarga. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1971.
- Almatsier, S., 2002. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Amang, B., 1995. Kebijakan Harga, Pengadaan dan Distribusi dalam rangka Swasembada Pangan. Prosiding Seminar Kebijaksanaan dan Strategi Menuju Tercapainya Swasembada Pangan. Bogor.
- Amang, B. dan Silitonga C., 1989. Kebijakan Harga, Subsidi, Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan. Makalah disampaikan pada Konperensi Nasional IX PERHEPI. Jakarta.
- Ariani, M. dan T. Sudaryanto, 1991. Pola Konsumsi Makanan Pokok, Konsumsi Energi dan Protein di Pedesaan Jawa Tengah. Departemen Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Arifin, B., 1994. Pangan Dalam Orde Baru. Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO). Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan, 2001. Rencana Induk Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur 2001-2004. Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Smeru, 2001. Paket Informasi Dasar : Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Chung, K.L. Haddad, J. Ramakhrisma and F. Riely. 1997. *Identifying the Food Insecure : The Application of Mixed-Method Approaches in India* IFPRI. Washington D.C.
- Erwido, H.P. Saliem dan M. Ariani, 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- FAO-RAPA, 1989. *Report of The Regional Expert Consultation of The Asian Network for Food and Nutrition and Urbanization*. Bangkok.
- Gunawan, M., 1991. Diversifikasi Pangan : Perlukah Mencari Bentuk Pola Pangan Ideal? Pangan Vol. II No. 9
- Hardinsyah dan Briawan, D., 1990. Penilaian dan Perencanaan Konsumsi Pangan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hardinsyah dan Martianto, D., 1992. Gizi Terapan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hardinsyah, Y.F. Baliwati, D. Martianto, H.S. Rachman, A. Widodo dan Subiyakto, 2001. Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan. Kerjasama antara Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Latief, D., Atmarita, Minarto, Basuni, A. dan Tilden, R., 1999. Konsumsi Pangan Tingkat Rumah tangga Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi. Makalah Disampaikan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII pada tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret 2000 di Jakarta.

- Maxwell, S., and Frankenberger, T.R., 1992. *Household Food Security : Concepts, Indicator, Measurements. A Technical Review*. United Nations Children's Fund, New York and International Fund for Agricultural Development, Rome. Italy.
- Muhilal, F. Jalal dan Hardinsyah, 1998. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan. Makalah disampaikan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VI tahun 1998.
- Pakpahan A. dan S.H. Suhartini, 1991. Permintaan Rumah Tangga Kota di Indonesia terhadap Keanekaragaman Pangan *dalam Jurnal Agro Ekonomi*. Pusat Penelitian Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2001. Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru Jawa Timur 2001. Buku-2 Kabupaten Trenggalek. Surabaya.
- Ravallion, M. 1997. *Famines and Economics*. Journal of Economic Literature
- Roedjito., D., 1987. Sinopsis dan Suntingan Perencanaan Gizi. PT Media Sarana Press. Jakarta.
- Sacchet, D.L., R. Brian., H. Gordon and P. Tugwel, 1991. *Clinical Epidemiology : A Basic Science for Clinical Medicine*. Second Edition. Little Brown and Company.
- Sediaoetama, A.D., 2000. Ilmu Gizi I. Dian Rakyat. Jakarta.
- Sediaoetama, A.D., 2001. Ilmu Gizi II. Dian Rakyat. Jakarta.
- Soekirman, 1996. Ketahanan Pangan : Konsep, Kebijakan dan Pelaksananya. Makalah disampaikan pada Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan Rumahtangga. Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- Sudaryanto, T. dan Achmad Djauhari, 1997. Penawaran, Permintaan dan Konsumsi Umbi-umbian dan Kacang-kacangan, Pra Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI, Departemen Pertanian.
- Suhardjo, 1998. Konsep dan Kebijaksanaan Diversifikasi Konsumsi Pangan dalam rangka Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, tanggal 17 - 20 Pebruari 1998. Jakarta.
- Timmer, C.P., Walter P. Falcon and Scott R. Pearson, 1983. *Food Policy Analysis*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore
- Wibowo, R, 2000. Pertanian dan Pangan. Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.